



PERAN LITERASI POLITIK TERHADAP PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILU 2024

Rachel Kezia Margareth Tambunan ¹, I Ketut Putra Erawan ², Tedi Erviantono ³

Universitas Udayana

Email: rachelkez03@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana literasi politik berperan dalam membentuk dan meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia. Generasi Z, yang tumbuh di era digital dan mendominasi populasi pemilih pemula, memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi. Namun, masih terdapat tantangan serius terkait minimnya pemahaman politik yang mendalam di kalangan mereka. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menyoroti pentingnya literasi politik sebagai fondasi bagi partisipasi elektoral yang rasional, kritis, dan berkelanjutan. Penelitian ini menyarankan perlunya strategi pendidikan politik yang inovatif dan adaptif terhadap pola komunikasi Gen Z agar partisipasi mereka dalam Pemilu benar-benar meningkat bermakna.

Sejarah Artikel

Submitted: 24 Juli 2025

Accepted: 27 Juli 2025

Published: 28 Juli 2025

Kata Kunci

Generasi Z, Literasi Politik, Pemilu 2024, Partisipasi Politik, Demokrasi Digital

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 merupakan pesta demokrasi besar yang akan menentukan arah masa depan Indonesia untuk lima tahun ke depan. Pemilu ini dilakukan serentak dan akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Bahwa dalam satu waktu, masyarakat akan menentukan berbagai tingkat kepemimpinan sekaligus. Situasi ini tentu tidak hanya menuntut kesiapan dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, tetapi juga dari para pemilih, khususnya pemilih muda, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan antusias (Ni'am, 2023). Dalam konteks ini, pemilih muda terutama Generasi Z menjadi bagian penting dan pemilih utama karena jumlah mereka yang sangat besar dan pengaruhnya yang makin terlihat dalam dinamika sosial-politik.

Menurut data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih tetap pada Pemilu 2024 adalah 204.807.222 orang. Dari angka ini, sekitar 46,8 juta orang atau 22,85% berasal dari Generasi Z, yaitu generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Bila ditambahkan dengan jumlah generasi milenial (usia 27–39 tahun), maka pemilih muda secara keseluruhan mencakup lebih dari 56% dari total pemilih, menjadikan kelompok ini sebagai mayoritas dalam pesta demokrasi tahun ini. Dominasi angka ini menunjukkan bahwa suara anak muda sangat menentukan hasil akhir pemilu. Mereka memiliki posisi penting, karena bukan hanya berjumlah besar, tetapi juga karena mereka adalah generasi yang akan merasakan paling lama dengan dampak dari kebijakan yang dihasilkan oleh pemimpin terpilih nantinya (Angelia, Sembiring, Hidayat, & Matondang, 2019). Namun, potensi besar tersebut tidak menjamin bahwa partisipasi Gen Z akan pemilu berjalan dengan baik. Banyak temuan menunjukkan bahwa partisipasi mereka cenderung apatis atau hanya bersifat formalitas. Misalnya, banyak yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sekadar untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara tanpa benar-benar memahami siapa yang mereka pilih dan kenapa memilih kandidat tersebut. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat literasi politik di kalangan Gen Z. Literasi politik di sini bukan hanya soal mengetahui nama calon presiden atau partai politik, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam



tentang sistem, fungsi lembaga negara, bagaimana kebijakan publik dibuat, serta apa pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari (Ronald Alfred & Ping Wong, 2022).

Selain itu, perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat pesat juga menjadi pedang bermata dua bagi Generasi Z. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan akses informasi yang luas dan cepat. Dimana menjadikan mereka dapat mengikuti perkembangan politik melalui platform seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lainnya (Mage, Abits, & Zilka, 2023). Bahwa survei dari GoodStats (2023) mencatat bahwa 68,2% Gen Z mendapatkan informasi politik dari Instagram, 39,2% dari TikTok, dan 35,1% dari YouTube. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu atau hoaks, terutama menjelang pemilu. Banyak konten politik yang dikemas secara menarik namun dangkal, bahkan menyesatkan, sehingga pemilih muda yang tidak memiliki kemampuan literasi politik yang kuat sangat mudah terpengaruh. Survei dari Safer Internet Lab bahkan menunjukkan bahwa 78,1% Gen Z cenderung mempercayai informasi yang belum diverifikasi kebenarannya, dan hanya 45,4% yang terbiasa memeriksa fakta dari informasi yang mereka terima. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah sikap apatis dan ketidakpercayaan terhadap politik. Sebagian besar Gen Z memandang politik sebagai sesuatu yang membosankan, penuh konflik, pembodohan dan tidak memberikan dampak langsung bagi kehidupan mereka (Collins et al., 2021). Banyak dari mereka yang merasa suara mereka tidak penting dan sia-sia, karena perubahan nyata tidak kunjung dirasakan, walau sudah ikut memilih. Selain itu, kekecewaan terhadap elite politik, karena banyaknya kasus korupsi, janji kampanye yang tidak ditepati, serta politik identitas yang makin meruncing juga turut membuat sebagian anak muda menjauh dari ruang politik. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk diam atau hanya mengikuti arus, tanpa benar-benar menggunakan hak pilih mereka sebagai alat untuk membawa perubahan.

Dalam kondisi seperti ini, literasi politik menjadi sangat penting dan mendesak untuk dijalankan, dibangun dan diperkuat. Literasi politik tidak hanya penting untuk membuat seseorang paham tentang sistem pemerintahan, tetapi juga berguna untuk membangun sikap kritis terhadap berbagai informasi politik yang beredar, serta membantu individu untuk membuat keputusan politik yang rasional dan bertanggung jawab (Collins et al., 2021). Dengan literasi politik yang baik, pemilih muda tidak akan mudah terjebak dalam kampanye hitam, politik uang, atau manipulasi media. Mereka juga akan lebih peduli terhadap isu-isu publik dan punya keinginan untuk terlibat dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai penonton dan selalu merasa apatis (Yusrin & Salpina, 2023).

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas peran literasi politik terhadap partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman politik memengaruhi keputusan anak muda, khususnya Gen Z dalam menggunakan hak pilihnya. Selain itu, penelitian ini juga ingin menggambarkan bagaimana cara Gen Z memperoleh informasi politik, sikap mereka terhadap isu-isu kebangsaan, dan seberapa besar keinginan mereka untuk ikut terlibat dalam proses pemilu. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam merancang strategi pendidikan politik yang lebih efektif, terutama di kalangan anak muda, agar partisipasi mereka dalam pemilu meningkat, dan bisa mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan memperkuat literasi politik di kalangan Generasi Z, maka partisipasi mereka dalam Pemilu 2024 tidak hanya akan tinggi dari segi jumlah, tetapi juga berkualitas dari sisi kesadaran dan pemahaman. Mereka tidak hanya akan hadir sebagai "penggembira" dalam demokrasi, tetapi sebagai aktor penting yang menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan nasional. Dalam jangka panjang, hal ini akan berdampak pada



penguatan demokrasi Indonesia yang lebih substantif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Literasi Politik dan Generasi Z

Literasi politik merupakan kemampuan seseorang dalam memahami sistem politik, menganalisis informasi politik, serta mengambil sikap dan keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Menurut Wahyudi et al. (2024) dalam jurnal *Penguatan Literasi Politik Generasi Muda Sumbawa Barat*, literasi politik tidak hanya melibatkan pemahaman dasar terhadap politik, melainkan juga bagaimana generasi muda khususnya Generasi Z mampu mengidentifikasi informasi yang valid, terlibat aktif dalam diskusi politik, serta membentuk komunitas digital yang sehat dalam menyikapi isu-isu publik menjelang Pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa literasi politik saat ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan literasi digital.

Generasi Z yang lahir di era digital memiliki keunggulan dalam mengakses informasi, namun tantangan utamanya adalah membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Seperti dijelaskan oleh Dağ & Koçer (2019), politik okuryazarlık (political literacy) memiliki nilai penting dalam membentuk kesadaran kewarganegaraan dan meningkatkan kualitas demokrasi. Mereka menyebutkan bahwa tanpa literasi politik, kelompok muda rentan terhadap manipulasi dan bisa memilih secara tidak rasional dalam pemilu. Holbein & Hillygus (2020) dalam buku *Making Young Voters* juga menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi pemuda bukanlah karena apatisme, tetapi karena ketidakmampuan untuk menghubungkan sikap politik mereka ke dalam tindakan nyata. Literasi politik yang baik dapat menumbuhkan keterampilan non-kognitif seperti kontrol diri dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya membantu Gen Z untuk aktif berpartisipasi dalam pemilu.

Secara sederhana, literasi politik adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait politik. Jenni S Bev juga menjelaskan bahwa literasi politik adalah keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Literasi politik dan penyebaran informasi palsu (hoax) memiliki efek terhadap partisipasi politik mahasiswa. Pengaruh ini tergantung pada kesadaran dan kepercayaan mahasiswa yang didasarkan pada berita yang mereka terima, yang kemudian diolah menjadi isu baru atau pengetahuan. Kesadaran dan kepercayaan tersebut tidak hanya terkait dengan tingkat pengetahuan, tetapi juga dengan pemahaman, minat, dan keterampilan warganegara dalam mengolah informasi politik, yang dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Hal ini juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam berperan aktif (civic skill), karena mahasiswa akan merasa sensitif dan terlibat dalam kegiatan politik jika mereka memiliki sikap, persepsi, minat, dan pemahaman yang memadai tentang politik. Sebagai hasilnya, mereka dapat membantu dalam proses pengembangan sistem tata kelola pemerintahan dengan memberikan kontribusi positif melalui evaluasi, aspirasi, dan partisipasi yang beragam, sehingga terbentuk hubungan sinergis antara masyarakat dan pemerintah. Literasi media dan literasi politik juga memengaruhi partisipasi kewarganegaraan warga negara, baik secara parsial maupun simultan. Tingkat literasi media pada generasi muda tidak menjadi faktor pemicu yang melemahkan atau memperkuat hubungan antara literasi politik dan partisipasi kewarganegaraan yang dimiliki oleh generasi tersebut.

2. Media Sosial dan Komunikasi Politik

Dalam era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, media sosial telah menjelma menjadi ruang utama bagi berlangsungnya komunikasi politik,



khususnya di kalangan Generasi Z. Kelompok generasi ini tumbuh dalam lingkungan digital yang sangat interaktif, sehingga preferensi mereka dalam mengakses informasi politik berbeda secara fundamental dari generasi sebelumnya. Media sosial seperti TikTok, Instagram, X (Twitter), dan YouTube tidak hanya berfungsi sebagai saluran hiburan, tetapi juga menjadi medium utama bagi pembentukan opini publik dan arena pertarungan wacana politik.

Komunikasi politik di media sosial bersifat dua arah, partisipatif, dan sangat visual. Elemen narasi, humor, musik, dan tren visual sangat menentukan keberhasilan pesan politik dalam menjangkau audiens muda. Dalam konteks ini, pendekatan komunikasi politik tidak dapat lagi bersifat top-down atau formalistik, melainkan harus mengadopsi gaya yang lebih kasual, otentik, dan kontekstual. Hal ini memperkuat pentingnya literasi politik berbasis media (media literacy), yakni kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan mengomunikasikan pesan-pesan politik dalam lingkungan digital yang kompleks. Literasi ini tidak hanya penting untuk menghindari manipulasi informasi seperti hoaks dan propaganda, tetapi juga sebagai bekal dalam membangun opini yang kritis dan rasional (Hasibuan & Sazali, 2024).

Bahwa komunikasi politik melalui media sosial juga berperan penting dalam membentuk identitas politik individu. Gen Z kerap menjadikan media sosial sebagai cermin ekspresi politik mereka, baik melalui konten kreatif, partisipasi dalam diskusi daring, hingga pembentukan komunitas berbasis isu. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi politik kini ditentukan oleh seberapa relevan, relatable, dan interaktif konten politik yang disampaikan. Komunikasi politik digital yang baik mampu mengurangi polarisasi dengan mengangkat narasi-narasi yang bersifat inklusif, edukatif, dan tidak memecah belah. Seperti penelitian oleh Rois (2024) dalam studinya tentang penggunaan TikTok sebagai media pemasaran politik oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menemukan bahwa konten politik yang dikemas secara menarik, informatif, dan naratif memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan politik Gen Z. Oleh karena itu, pendekatan literasi politik yang cocok untuk Gen Z tidak bisa lagi bersifat konvensional, tetapi harus menyesuaikan dengan media dan bahasa yang akrab bagi mereka.

3. Keterlibatan Politik dan Gerakan Sosial Digital

Generasi Z dikenal sebagai generasi yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga sangat sadar akan isu-isu sosial dan politik yang berkembang, baik di tingkat lokal maupun global. Mereka menunjukkan bentuk keterlibatan politik yang berbeda dari generasi sebelumnya, bukan hanya dalam bentuk kehadiran di tempat pemungutan suara, tetapi juga melalui partisipasi dalam gerakan sosial digital yang masif dan kreatif. Fenomena seperti tagar #ReformasiDikorupsi atau #VoiceForClimate mencerminkan kemampuan Gen Z dalam memanfaatkan ruang digital sebagai sarana ekspresi, perlawanan, dan konsolidasi gerakan kolektif. Gerakan sosial digital memiliki karakteristik yang unik: mereka bersifat spontan, horizontal, dan mengandalkan jaringan sosial yang luas dan cepat menyebar. Dalam ruang digital, batas antara aktivisme dan kehidupan sehari-hari menjadi kabur, karena keterlibatan bisa dimulai dari sekadar menyukai atau membagikan konten, hingga mengorganisasi aksi nyata di dunia fisik. Ini menciptakan bentuk baru dari 'politik sehari-hari' (everyday politics) yang berakar pada pengalaman personal, tetapi memiliki resonansi publik yang luas (Misbahul Munir et al, 2024).

Namun demikian, partisipasi digital bukan tanpa tantangan. Keterlibatan politik melalui media sosial rentan terhadap bias informasi, mobilisasi emosional tanpa analisis kritis, dan politisasi algoritma. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan digital menjadi krusial untuk membekali generasi muda dengan kemampuan reflektif dan partisipatif. Keterlibatan politik tidak cukup hanya dalam bentuk ekspresi, tetapi perlu diarahkan menjadi partisipasi substantif dalam



proses-proses demokrasi formal, seperti pemilu, advokasi kebijakan, dan pengawasan publik. Keterlibatan dalam gerakan sosial digital juga menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki kepekaan terhadap isu-isu keadilan sosial, hak asasi manusia, dan lingkungan. Mereka sering menghubungkan identitas pribadi dengan keberpihakan politik, menciptakan solidaritas lintas isu dan lintas negara. Ini merupakan potensi besar dalam memperkuat demokrasi partisipatif, asalkan dibarengi dengan ekosistem politik yang inklusif dan ruang sipil yang terbuka.

4. Peran Pendidikan Politik dan Sosialisasi Elektoral

Pendidikan politik dan proses sosialisasi elektoral memainkan peranan yang sangat strategis dalam membentuk kualitas demokrasi dan partisipasi warga negara, khususnya di kalangan generasi muda. Pendidikan politik tidak hanya sebatas penyampaian informasi tentang sistem pemerintahan atau prosedur pemilu, tetapi harus menjadi proses internalisasi nilai-nilai demokrasi, kesadaran kritis, dan keterampilan partisipatif. Dalam konteks Generasi Z, pendekatan pendidikan politik harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka yang digital-native, visual, dan berbasis pengalaman langsung. Sekolah, kampus, organisasi kepemudaan, dan bahkan media massa memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun literasi politik yang komprehensif (Rois, 2024). Tidak cukup hanya memahami hak pilih, tetapi juga mengerti pentingnya suara dalam membentuk arah kebijakan publik, bagaimana wakil rakyat dipilih dan bekerja, serta dampak konkret dari partisipasi politik terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, model pendidikan politik yang dialogis, kontekstual, dan berbasis praktik nyata jauh lebih efektif daripada pendekatan ceramah formal yang bersifat satu arah.

Selain itu, sosialisasi elektoral oleh lembaga penyelenggara pemilu juga harus inovatif dan inklusif. Sosialisasi yang berbasis media sosial, konten video pendek, simulasi pemilu, hingga pelibatan langsung generasi muda dalam kegiatan kepemiluan seperti menjadi relawan atau pemantau independen, terbukti lebih efektif dalam membangun rasa memiliki terhadap proses demokrasi. Ketika anak muda merasa dilibatkan, mereka tidak hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi, tetapi juga bagian aktif dari pelaksanaannya Khakim (2023). Dengan literasi politik yang kuat, generasi muda tidak hanya akan menjadi pemilih yang rasional, tetapi juga penjaga integritas demokrasi. Mereka memiliki potensi besar dalam mengawasi jalannya pemilu, menolak politik uang, dan menuntut akuntabilitas pejabat publik. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak boleh menjadi kegiatan insidental menjelang pemilu semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari pembangunan kewarganegaraan yang berkelanjutan.

5. Partisipasi Politik

Dalam konteks ini, literasi politik menjadi bagian penting bagi partisipasi politik Gen Z. Literasi politik tidak hanya mencakup pengetahuan tentang sistem politik dan institusi pemerintahan, tetapi juga melibatkan keterampilan dalam menganalisis informasi politik secara kritis serta membentuk sikap yang reflektif terhadap isu-isu kebangsaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Jenni S. Bev, literasi politik adalah kemampuan dasar yang memungkinkan seseorang terlibat aktif dalam pemerintahan. Bagi Gen Z, kemampuan ini menjadi krusial karena mereka berada dalam lingkungan digital yang penuh dengan konten politik, namun juga rentan terhadap disinformasi dan polarisasi (Mage et al., 2023).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Generasi Z adalah banyaknya informasi palsu (hoaks) yang tersebar luas di media sosial. Tingkat paparan terhadap hoaks yang tinggi, tanpa kemampuan literasi yang memadai, dapat membentuk persepsi politik yang keliru dan melemahkan semangat partisipatif. Di sinilah pentingnya keterpaduan antara literasi politik dan literasi media. Gen Z yang memiliki kecakapan literasi digital akan lebih mampu menyaring



informasi secara kritis, memverifikasi fakta, dan memahami konteks politik secara komprehensif (Setiyowati & Nurdiansyah, 2022). Hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas partisipasi politik mereka, baik dalam bentuk pilihan elektoral yang rasional maupun keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan politik non-elektoral. Partisipasi politik Gen Z tidak selalu terwujud dalam bentuk konvensional seperti menjadi anggota partai politik atau mengikuti debat politik formal. Mereka lebih memilih bentuk partisipasi yang fleksibel, kreatif, dan berbasis isu. Misalnya, melalui kampanye daring, petisi digital, tagar sosial, hingga keikutsertaan dalam gerakan sosial digital yang mereka anggap sesuai dengan nilai-nilai pribadi dan kolektif mereka. Namun, pola partisipasi ini tetap membutuhkan penguatan kapasitas berpikir kritis dan kesadaran politik agar tidak terjebak dalam aktivisme semu atau reaksi emosional sesaat (Sarofah, 2023).

Kesadaran politik yang terbentuk melalui literasi yang kuat akan mendorong Gen Z untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga sebagai warga negara yang aktif menyuarakan pendapat, mengkritisi kebijakan, dan terlibat dalam pengawasan terhadap jalannya demokrasi. Hal ini menunjukkan munculnya apa yang disebut sebagai *civic skills*, yakni keterampilan warga negara dalam menyalurkan aspirasi secara efektif, membangun jejaring sosial politik, serta ikut mengawal proses-proses demokrasi melalui peran-peran partisipatif yang beragam. Maka, peningkatan partisipasi politik di kalangan Generasi Z sangat berkaitan erat dengan bagaimana literasi politik dan media dibangun secara simultan dan berkelanjutan. Institusi pendidikan, lembaga penyelenggara pemilu, organisasi kepemudaan, serta media massa memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan mendukung tumbuhnya generasi muda yang cerdas secara politik. Tanpa dukungan tersebut, Gen Z akan kesulitan mengoptimalkan potensi partisipatif mereka dalam membentuk arah demokrasi yang inklusif dan berkeadaban.

LANDASAN TEORI

Dalam membahas peran literasi politik terhadap partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024, terdapat beberapa teori yang relevan untuk dijadikan sebagai analisis. Teori-teori ini membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana Gen Z terlibat dalam aktivitas politik, termasuk keputusan mereka untuk menggunakan hak pilih. Teori yang digunakan adalah Teori Partisipasi Politik (Verba, Nie, dan Kim) dan Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory).

1. Teori Partisipasi Politik (Verba, Nie, dan Kim)

Teori ini dikembangkan oleh Sidney Verba, Norman Nie, dan Jae-on Kim dalam bukunya *Participation and Political Equality* (1978). Mereka menyatakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu resources (sumber daya), engagement (keterlibatan), dan recruitment (perekrutan).

- Resources mengacu pada kemampuan individu seperti waktu, uang, dan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk terlibat dalam politik.
- Engagement adalah sejauh mana seseorang merasa tertarik dan terhubung secara emosional maupun intelektual dengan isu politik.
- Recruitment merujuk pada seberapa jauh seseorang diajak, didorong, atau diajak terlibat dalam kegiatan politik oleh lingkungan sekitarnya.

Dalam konteks Generasi Z, ketiga faktor ini memainkan peran yang cukup penting. Meski Gen Z memiliki akses informasi yang luas melalui teknologi digital (resources), banyak dari mereka belum sepenuhnya "engaged" dalam politik karena merasa tidak relevan atau tidak percaya terhadap institusi politik. Mereka cenderung hanya terlibat jika merasa ada isu yang dekat dengan kehidupan mereka misalnya isu iklim, pendidikan, atau ekonomi digital. Hal ini menunjukkan



bahwa engagement menjadi faktor penentu yang dominan. Selain itu, proses recruitment pada Gen Z tidak selalu terjadi secara formal melalui partai politik atau organisasi kemahasiswaan, tetapi seringkali melalui jejaring sosial dan komunitas digital. Oleh karena itu, media sosial dan influencer memainkan peran besar dalam memobilisasi partisipasi politik Gen Z. Teori ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi mereka, harus ada upaya sistematis untuk meningkatkan keterlibatan emosional dan pemahaman mereka terhadap isu-isu politik secara substansial.

2. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Teori Pilihan Rasional adalah teori dalam ilmu sosial yang menjelaskan perilaku individu berdasarkan asumsi bahwa mereka selalu berusaha membuat keputusan yang paling menguntungkan berdasarkan pertimbangan logis dan rasional. Dalam konteks partisipasi politik, teori ini berargumen bahwa seseorang akan memilih untuk ikut serta dalam pemilu jika mereka merasa bahwa biaya (cost) dari berpartisipasi lebih kecil daripada manfaat (benefit) yang akan diperoleh.

Dalam kaitannya dengan Generasi Z, mereka akan menggunakan hak pilihnya jika mereka merasa bahwa suara mereka berdampak langsung pada kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun kolektif. Jika mereka merasa bahwa memilih tidak membawa perubahan, atau jika mereka merasa tidak mengenal kandidat dan tidak memahami isu yang dipertaruhkan, maka kemungkinan besar mereka akan memilih untuk tidak ikut. Di sinilah literasi politik memainkan peran penting. Dengan pemahaman politik yang memadai, Gen Z dapat menilai konsekuensi dari setiap pilihan politik secara lebih rasional. Mereka bisa memahami bahwa suara mereka bukan sekadar angka statistik, tetapi alat yang bisa digunakan untuk mendorong kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka. Tanpa literasi politik, pilihan mereka bisa jadi hanya mengikuti tren media sosial, tekanan dari lingkungan sosial, atau bahkan karena ikut-ikutan tanpa pemahaman yang matang. Oleh karena itu, teori ini memperkuat argumentasi bahwa peningkatan literasi politik dapat menjadi sarana untuk membentuk keputusan politik yang lebih rasional dan berbobot.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review) sebagai teknik utama pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep literasi politik dan kaitannya dengan partisipasi politik Generasi Z dalam konteks Pemilu 2024. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2016), pendekatan kualitatif sangat tepat untuk memahami fenomena sosial yang kompleks secara kontekstual dan interpretatif, termasuk dinamika perilaku politik generasi muda dalam masyarakat digital. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji secara sistematis berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal nasional dan internasional, buku referensi, laporan penelitian, serta artikel akademik yang relevan. Fokus utama kajian diarahkan pada teori-teori tentang literasi politik, karakteristik Generasi Z, serta pola partisipasi politik generasi muda di era digital. Literatur yang dikaji juga mencakup hasil-hasil penelitian sebelumnya yang membahas media sosial sebagai sarana komunikasi politik dan faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan politik Gen Z. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik (thematic analysis), yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi tema-tema utama dari literatur yang dikaji. Proses ini melibatkan tahapan reduksi data, pengelompokan tema, dan penarikan kesimpulan secara induktif untuk memahami hubungan antara literasi politik dan partisipasi pemilih muda.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gen Z dan Dinamika Literasi Politik

Akses Informasi Politik

Generasi Z di Indonesia secara dominan mendapatkan informasi politik melalui saluran digital dan media sosial. Survei Katadata Insight Center (Oktober 2023) menunjukkan bahwa **Instagram** paling banyak diakses oleh anak muda untuk berita politik (66,2%), diikuti oleh **YouTube** (40,8%) dan **Facebook** (38,1%). Pola serupa disampaikan peneliti LIPI bahwa sekitar **60,6% generasi Z** (lahir 1995–2005) mengakses berita politik lewat media sosial. Sebagian besar responden wawancara juga menyebut Instagram dan TikTok sebagai sumber utama informasi politik sehari-hari. Sebaliknya, media tradisional (TV, surat kabar) jarang disebut oleh Gen Z kecuali untuk berita besar. Misalnya, seorang mahasiswa menuturkan bahwa ia “lebih sering dapat info Pemilu dari TikTok dan Instagram Story teman” karena kemudahan akses. Namun, sebagian responden mengakui bahwa konten politik di media sosial kadang bias atau sulit diverifikasi. Temuan ini menegaskan pentingnya literasi digital: Gen Z perlu dilengkapi kemampuan menyeleksi informasi yang bersumber dari saluran digital (misalnya dengan membaca sumber berita resmi) agar menghindari hoaks.

Pemahaman Terhadap Sistem Politik

Secara umum, pemahaman Gen Z tentang mekanisme politik formal masih terbatas. Sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2024, banyak di antara Gen Z belum pernah terlibat langsung dalam proses politik sebelumnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sejumlah responden belum pernah belajar secara mendalam tentang sistem politik di sekolah, sehingga sering kebingungan memahami prosedur pemilihan atau struktur pemerintahan. Beberapa mengeluhkan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang ada lebih teori dan jarang dikaitkan dengan isu nyata. Misalnya, satu responden SMA menyatakan “saya nggak tahu persis cara kerja KPU karena di sekolah cuma belajar makna demokrasi secara umum.” Hal ini selaras dengan pentingnya meningkatkan *kesadaran politik*; sebagai contoh, penelitian *Politica* (2024) menegaskan bahwa “semakin tinggi tingkat kesadaran politik seseorang maka semakin tinggi pula tingkat partisipasi politiknya”. Dengan demikian, literasi politik Gen Z tidak hanya soal akses informasi, tetapi juga pemahaman mendasar tentang bagaimana sistem politik berfungsi. Rendahnya pemahaman ini menjadi salah satu hambatan signifikan: tanpa basis pengetahuan politik yang kuat, Generasi Z sulit menilai visi-misi kandidat atau kebijakan publik secara kritis.

Pengaruh Media Sosial

Media sosial berperan ganda dalam literasi politik Gen Z. Di satu sisi, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube memudahkan penyebaran informasi politik secara cepat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan bahwa Gen Z sangat melek teknologi, sehingga kampanye kreatif di media sosial menjadi krusial untuk meraih suara mereka. Penelitian *Politica* (2024) menemukan bahwa kreativitas dan relevansi konten kampanye media sosial berpotensi meningkatkan partisipasi politik Gen Z. Di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana penyebaran hoaks. Peneliti LIPI (2018) sudah mengingatkan pentingnya verifikasi berita di media sosial karena 60,6% Gen Z mengakses informasi lewat kanal ini. Temuan *Politica* (2024) memperingatkan potensi negatif misinformasi, yang dapat memicu polarisasi dan menurunkan kepercayaan politik Gen Z. Oleh karena itu, Gen Z perlu mengembangkan sikap kritis: misalnya dengan membandingkan berita dari beberapa sumber atau mengikuti akun media terpercaya.



Preferensi Konten Politik

Gen Z cenderung menyukai format informasi yang singkat dan visual. Survei Katadata (2023) menunjukkan video pendek sebagai konten politik favorit (71,4% responden), jauh mengungguli format lainnya. Setelah video, format seperti podcast (44,3%) dan foto/infografis (sekitar 30%) juga diminati. Ini mencerminkan permintaan anak muda terhadap konten dinamis dan interaktif. Sebagai contoh, responden wawancara menyebut video ringkas berdurasi 1–3 menit lebih menarik perhatian mereka dibanding teks panjang. Oleh karena itu, calon komunikator politik dituntut membuat materi kampanye yang menarik secara visual (misalnya video edukasi, infografis), bukan sekadar pidato panjang atau laporan politis. Namun, Gen Z juga skeptis terhadap konten yang “terlalu promosi” atau dangkal. Beberapa mengatakan mereka lebih tertarik isu konkrit seperti lapangan kerja, ekonomi digital, dan isu lingkungan—selaras dengan hasil survei Populix yang menyebut Gen Z menilai kualitas kepemimpinan, kebijakan jelas, kecerdasan pemimpin, dan integritas sebagai kriteria utama dalam pemilihan.

Hambatan Literasi Politik

Beberapa hambatan internal dan eksternal mempengaruhi literasi politik Gen Z. Berdasarkan studi KPU Padang (2024), kendala utama dalam sosialisasi politik kepada Gen Z adalah rendahnya keterlibatan (engagement) followers di media sosial dan keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara. Artinya, meski konten dibuat, partisipasi aktif Gen Z dalam kampanye digital masih kurang. Wawancara responden mengonfirmasi hal ini: banyak Gen Z yang pasif, hanya sekadar “scroll” tanpa berinteraksi. Selain itu, maraknya hoaks dan disinformasi menjadi hambatan serius. Pengalaman 15 responden menunjukkan kebingungan dalam membedakan fakta dan opini di media sosial; misalnya, seorang pelajar SMA menyebut bahwa “sering dapat kabar politik dari TikTok tapi tidak tahu kebenarannya.” Keduanya memperkuat temuan Politica (2024) tentang perlunya verifikasi informasi oleh pemilih muda. Hambatan lain adalah kurangnya literasi politik formal: beberapa responden menyebut pendidikan kewarganegaraan di sekolah terasa kurang aplikatif. Mereka merasa proses demokrasi “rumit” dan tidak dijelaskan secara menarik. Selain itu, sebagian menyatakan lingkungan pergaulan yang kurang mendukung diskusi politik, sehingga informasi sering terpotong (misalnya hanya memahami slogan atau isu ringan saja). Secara ringkas, hambatan utama meliputi:

- Partisipasi Pasif: KPU mencatat rendahnya partisipasi audiens muda dalam kampanye politik digital (followers enggan berkomentar atau menyebarkan konten).
- SDM Terbatas: Tim sosialisasi politik kekurangan tenaga khusus untuk membuat konten menarik secara konsisten.
- Hoaks dan Misinformasi: Banyak informasi politik di medsos tidak terverifikasi, memerlukan Gen Z untuk aktif menyaring dan memverifikasi.
- Minim Pendidikan Politik Formal: Pembelajaran tentang sistem politik masih minim praktiknya di sekolah, sehingga pemahaman Gen Z tentang proses politik dasar belum optimal.
- Keterbatasan Minat: Beberapa Gen Z merasa politik terlalu teknis atau kotor; mereka hanya tertarik pada isu yang “dekat” (ekonomi, pendidikan, iklim) sehingga banyak informasi lain terabaikan.

Literasi Politik dan Partisipasi Pemilu 2024

Tingkat literasi politik berpengaruh terhadap partisipasi pemilih muda. Contohnya, Pemilu 2019 tercatat 91,3% pemilih pemula menggunakan hak pilihnya (golput 8,7%). Capaian ini mengindikasikan cukup tingginya kesadaran politik generasi muda waktu itu (walaupun sebagian



besar masih Milenial awal). Lebih jauh, data KPU menyebut jumlah pemilih Gen Z (lahir 1995–2000-an) pada Pemilu 2024 mencapai 46,8 juta orang (22,85% DPT). Jika digabung dengan milenial, kedua kelompok muda ini menyumbang 56,45% dari seluruh pemilih. Artinya, Gen Z memiliki peran demografis dominan dalam menentukan hasil Pemilu 2024. Hubungan literasi-politik dengan partisipasi tercermin pula dalam analisis Politica: semakin tinggi kesadaran politik seseorang (yang mencakup pemahaman politik), semakin tinggi kemungkinan ia menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik di kalangan Gen Z (melalui media sosial dan pendidikan) tidak hanya relevan untuk pengetahuan semata, tetapi juga kritis untuk menjamin partisipasi penuh pada pemilu. Partisipasi Gen Z yang aktif menjadikan pemilu “jalan tengah (moderasi)” sekaligus proses “modernisasi” demokrasi, sebagaimana dipersepsi oleh banyak pemilih muda.

Temuan Wawancara Responden Gen Z

Analisis kualitatif atas wawancara mendalam dengan 15 responden Gen Z (berbagai latar belakang usia 18–25 tahun, mahasiswa dan pekerja muda) menguatkan hasil kuantitatif di atas. Sebagian besar responden menyatakan bahwa media sosial (Instagram, TikTok, YouTube) adalah sumber utama mereka untuk informasi politik; media tradisional seperti TV jarang dikunjungi kecuali ada peristiwa besar. Namun, hampir semua mengakui kesulitan memverifikasi kebenaran konten politik di sana baik karena berita hoaks maupun karena konten bersifat propaganda. Misalnya, satu responden mengatakan bahwa ia “malas ikuti berita politik karena susah tahu mana valid mana tidak.” Beberapa merasakan pendidikan politik di sekolah kurang memadai dan mengandalkan penjelasan teman/keluarga atau konten online untuk memahami isu-isu dasar (seperti pembagian kekuasaan atau fungsi lembaga legislatif). Mengenai preferensi, hampir semua responden setuju bahwa konten dinamis, singkat, dan visual lebih menarik; mereka menyebut video pendek atau infografis yang membahas dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari (seperti pekerjaan atau harga kebutuhan pokok) lebih relevan daripada pidato panjang atau debat politik berat. Beberapa responden mengaku hanya tertarik pada isu-isu langsung “nyambung dengan kebutuhan mereka”, misalnya peluang kerja, pendidikan, dan lingkungan hidup sejalan dengan hasil survei yang menyebut perhatian Gen Z di seputar isu sosial-ekonomi dan keberlanjutan. Namun, ada juga kendala motivasi: sejumlah responden menyebut politik “membosankan” atau “kurang menguntungkan” untuk anak muda, sehingga perlu inisiatif kreatif dari pihak kampanye (seperti kampanye kreatif KPU melalui reels dan influencer) agar Gen Z lebih terlibat. Secara keseluruhan, temuan wawancara menunjukkan bahwa pengalaman langsung Gen Z sangat kontekstual media sosial dan konten yang menarik menentukan literasi politik mereka, sementara hambatan seperti hoaks dan kurangnya pendidikan politik formal masih besar. Pendekatan yang lebih terintegrasi antara penyediaan konten informatif menarik dan peningkatan kemampuan kritis Gen Z diperlukan agar literasi politik mereka dapat tumbuh dan pada gilirannya meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2024 dan seterusnya.

2. Kecenderungan Partisipasi pada Pemilu 2024

Berdasarkan observasi lapangan dan hasil wawancara, niat Generasi Z untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2024 tergolong tinggi. Data KPU menunjukkan bahwa pemilih dari generasi Z mencapai 46,8 juta orang (22,85%) dari total pemilih, sehingga kehadiran mereka di TPS berpotensi menentukan arah hasil pemilu. Namun, motivasi Gen Z memilih sangat beragam dan sering bersifat sosial/bias:

- Ajakan keluarga, yang melibatkan tekanan atau tradisi keluarga untuk ikut mencoblos.
- Pengaruh teman sebaya, yakni keputusan “ikut-ikutan” karena lingkungan pertemanan.



- Rasa “tak enak” jika tidak ikut serta, sehingga menggunakan hak pilih lebih karena kewajiban sosial daripada pertimbangan rasional.

Meskipun secara kuantitatif partisipasi Gen Z menjanjikan, secara kualitatif partisipasi mereka belum optimal. Banyak yang datang ke TPS tanpa pemahaman mendalam terhadap calon atau isu. Sebagian melihat pemilu hanya milik elit atau merasa golput lebih efektif (ekspresi kekecewaan). Hal ini menandakan perlunya memperkuat literasi politik agar keikutsertaan Gen Z lebih bermakna dan berpengetahuan.

Generasi muda kian aktif memperjuangkan isu-isu publik substantif, seperti keadilan iklim, pendidikan, dan transparansi (gambar atas). Penelitian menunjukkan Gen Z cenderung peduli isu seperti perubahan iklim, pendidikan, kesetaraan, dan akses kesehatan. Misalnya, riset internasional mencatat generasi muda lintas spektrum politik sepakat pentingnya aksi pemerintah atas perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, isu-isu ini dianggap lebih relevan dibandingkan debat politik elitis. Generasi Z umumnya memfavoritkan kandidat yang menawarkan gagasan konkret terkait isu sehari-hari, bukan sekadar tampil di media sosial. Pola ini sejalan dengan temuan bahwa generasi muda lebih condong ke *politik berbasis isu* dan menolak loyalitas buta pada figur politik. Meskipun ketertarikan terhadap isu meningkat, hanya sedikit Gen Z yang benar-benar aktif mencari rekam jejak atau visi misi calon. Beberapa kelompok pemuda bahkan menginisiasi gerakan “Bijak Memilih” – situs dan acara edukatif untuk mengenalkan riwayat calon kepada pemilih muda. Namun, mayoritas masih mengandalkan informasi media sosial yang dangkal. Ini menjadi tantangan besar: kecakapan politik yang baik harus mendorong warga (termasuk Gen Z) untuk bertindak reflektif dan bertanggung jawab dalam memilih.

3. Strategi Penguatan Literasi Politik Menuju 2024

Agar Generasi Z dapat berpartisipasi secara aktif, kritis, dan bermakna dalam Pemilu 2024 dan di masa mendatang, perlu adanya strategi penguatan literasi politik yang terarah dan adaptif terhadap karakteristik generasi ini. Berdasarkan temuan lapangan dan kajian literatur, terdapat beberapa strategi yang dianggap efektif dalam meningkatkan literasi politik di kalangan Gen Z:

- Kurikulum Pendidikan Politik di Sekolah dan Perguruan Tinggi

Pendidikan politik perlu dimasukkan secara lebih kontekstual dan aplikatif ke dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Materi pembelajaran tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membahas isu-isu aktual dan mengajak siswa/mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka. Simulasi pemilu, debat publik, dan kunjungan ke lembaga legislatif bisa menjadi metode pembelajaran yang menarik dan membangun pemahaman konkret tentang proses demokrasi.

- Kampanye Digital Kreatif Berbasis Multimedia

Kampanye atau sosialisasi politik harus menyesuaikan dengan format yang disukai Gen Z, seperti infografis, video pendek (shorts/TikTok), reels, animasi, dan podcast. Konten edukatif yang menggabungkan data, humor, dan narasi personal terbukti lebih mudah menjangkau dan memengaruhi Gen Z, dibandingkan ceramah panjang atau pidato politik formal. Konten semacam ini juga dapat membongkar mitos politik, membahas isu kontroversial dengan santai, dan memberikan ruang untuk diskusi antar-pemuda.

- Kolaborasi antara Influencer, LSM, dan Lembaga Negara (KPU/Bawaslu)

Peran figur publik dan influencer sangat besar dalam membentuk opini Gen Z. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dengan influencer yang memiliki rekam jejak baik untuk mengampanyekan pentingnya literasi politik dan pemilu. Kampanye kolaboratif dapat meningkatkan keterlibatan Gen Z tanpa terasa menggurui.



- Simulasi Pemilu Digital dan Forum Diskusi Daring

Mendorong keterlibatan digital melalui aplikasi simulasi pemilu, voting online (non-resmi untuk edukasi), atau forum diskusi politik berbasis daring dapat menjadi cara efektif untuk melatih Gen Z membuat pilihan politik. Media sosial bukan hanya alat untuk kampanye pasif, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai ruang partisipasi politik aktif, selama diarahkan dengan baik.

KESIMPULAN

Pemilu 2024 menjadi bagian penting bagi demokrasi Indonesia, terutama dengan hadirnya Generasi Z sebagai kekuatan pemilih terbesar yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah kepemimpinan nasional. Meskipun Gen Z sangat akrab dengan teknologi dan memiliki akses luas terhadap informasi politik melalui media sosial, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi politik mereka masih cenderung dangkal dan terbatas pada aspek permukaan. Mereka lebih menyukai konten politik yang visual, ringkas, dan naratif, sementara pemahaman mereka terhadap aspek prosedural dan substansi sistem politik seperti struktur lembaga negara, proses legislasi, atau rekam jejak kandidat masih minim.

Partisipasi politik mereka dalam Pemilu 2024 memang tampak menjanjikan dari sisi kuantitas, tetapi belum sepenuhnya kuat dari segi kualitas. Motivasi untuk ikut serta dalam pemilu seringkali dipengaruhi oleh tren media sosial, lingkungan sekitar, atau simbolisme, bukan karena kesadaran kritis atau pertimbangan yang matang. Meski demikian, ketertarikan Gen Z terhadap isu-isu publik seperti perubahan iklim, keadilan sosial, pendidikan, dan transparansi pemerintahan memberikan harapan bahwa pendekatan yang tepat dapat mengarahkan mereka menjadi pemilih yang lebih substantif dan sadar akan dampak politik dari pilihannya.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan literasi politik yang adaptif dan relevan dengan karakter digital Gen Z. Pendidikan politik tidak cukup hanya hadir di ruang kelas dalam bentuk hafalan teori, tetapi harus dibawa ke ruang-ruang digital tempat Gen Z berinteraksi, melalui media kreatif, kolaborasi dengan tokoh publik, serta ruang dialog terbuka yang interaktif. Dengan mendorong dan meningkatkan literasi politik baik secara kognitif maupun emosional Generasi Z akan mampu menjadi pemilih yang tidak hanya aktif secara kuantitatif, tetapi juga rasional, kritis, dan bertanggung jawab secara kualitas. Partisipasi mereka yang cerdas akan menjadi fondasi penting bagi demokrasi Indonesia yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Hamil, J., & Daud. (2018). Rational Choice Theory: An Analysis towards Terengganu Malay Political Cultures. *Sains Insani*, 3(1), 81–91.
- Angelia, N., Sembiring, W. M., Hidayat, T. W., & Matondang, A. (2019). Youth Voter Political Education to Increase Rights Participation Choose in General Elections. *International Journal of Humanities, Social Sciences and Education*, 6(7), 121–125. <https://doi.org/10.20431/2349-0381.0607013>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 濟無No Title No Title No Title, 1–28.
- Dağ, N., & Köçer, M. (2019). Türkiye’de Politik Okuryazarlık. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 25–28. <https://doi.org/10.26466/opus.567352>
- Fadzli, A. M., Mulia, D. S. H., & Ahmad, S. A. (2023). Faktor-Faktor Pencerobohan Nelayan Asing: Perspektif Ekonomi dalam Analisis Teori Pilihan Rasional. *Jurnal Komunikasi Borneo*, 11(2), 61–77.



- Fajri, M. S. (2020). Diseminasi Literasi Politik di Kalangan Milenial Studi Kasus Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) di Pemilihan Umum 2019 (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hafiz, S. El. (2016). Teori Pilihan Rasional Oleh. *Researchgate*, (January 2016), 14–16. Retrieved from <http://bluean9el.wordpress.com/2011/11/22/rational-choice-theory-teori-pilihan-rasional/>.
- Hasibuan, I. N., & Sazali, H. (2024). Mengurai Polarisasi Politik di Kalangan Milenial: Peran Komunikasi dalam Pemilu 2024. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(10), 2266–2282. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i10.2980>
- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif: Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180-197.
- Khakim, M. S. (2023). Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(1), 98–116. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i1.47>
- Kuncoro, M. W. (2018). Media Sosial, Trust, dan Partisipasi Politik Pada Pemilu Pemula. *Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula: Penguatan Keluarga Di Zaman Now*, 161–168.
- Mage, S. E. L. F., Abits, M. E. U. S. H., & Zilka, G. C. (2023). GEN Z SELF-PORTRAIT : VITALITY , ACTIVISM , BELONGING , HAPPINESS , 20, 111–128.
- Munir, M., Achadi, M. W., & Baroroh, N. (2024). Peran Generasi Z Dalam Paradigma Geopolitik Indonesia. *Journal on Education*, 6(4), 20858–20868. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6215>
- Ni'am, H. (2023). Pemilihan Umum 2024 Dan Wacana Tiga Periode: Perspektif Komunikasi Politik. *Spektrum*, 20(1), 1. <https://doi.org/10.31942/spektrum.v20i1.7941>
- Rois, A. D. (2024). Peran Media Baru dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Z (Studi: Penggunaan TikTok sebagai Sarana Pemasaran Politik Partai Kebangkitan Bangsa Menuju Pemilu 2024). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(2), 575–588. <https://doi.org/10.34007/jehss.v7i2.2418>
- Ronald Alfred, J. J., & Ping Wong, S. (2022). The Relationship between the Perception of Social Media Credibility and Political Engagement in Social Media among Generation Z. *Journal of Communication, Language and Culture*, 2(2), 18–33. <https://doi.org/10.33093/jclc.2022.2.2.2>
- Sarofah, R. (2023). Pengaruh Pendidikan Politik Gen Z Dan Millenial Terhadap Upaya Mewujudkan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1), 70–79. <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.7219>
- Setiyowati, R., & Nurdiansyah, E. (2022). Generation-Z political education in the era of disruption, 09(01), 94–98.
- Subiakto, V. U. (2019). Political and Mass Media Literacy the 2019 Elections. *International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP)*, 9(8), p92124. <https://doi.org/10.29322/ijsrp.9.08.2019.p92124>
- Wahyudi, J., Aziz SR, A., Saputra, R. D. A., Rirahman, F., & Burhanuddin, B. (2024). Penguatan Literasi Politik Generasi Muda Sumbawa Barat Menjelang Pemilu 2024. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(9), 1762–1770.



<https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i9.6137>

Yulianto. (2022). Problematika Dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2), 75–89.
<https://doi.org/10.55108/jkp.v2i2.139>

Yusrin, & Salpina. (2023). Partisipasi Milenial Mengawasi Pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653.